**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas
Terhadap Alokasi Dana Desa
(Studi Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram)**

**Aminah¹, Albertus Daoni², Tina Miniawati³,
Khairudin⁴**

Faculty of Economic and Business, Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar Lampung
Email: aminah@ubl.ac.id¹; albertusdaoni788@gmail.com²; tinabarusman@ubl.ac.id³;
khairudin@ubl.ac.id⁴

Abstrak

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi di desa merbau mataram yang mendapatkan ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Merbau Mataram sudah akuntabel Baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan untuk transparan pada desa merbau mataram belum transparan terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi dan Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

1. Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di sektor pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai dengan di wilayah desa, yang semuanya itu membutuhkan suatu pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun juga terkadang masih terdapat pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban

yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk sektor daerah desa. Dalam perkembangannya saat ini harus di perhatikan dan diberdayakan sehingga dapat menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat guna untuk mencapai masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa juga memiliki suatu wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 No.47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa sangat rawan terhadap tindakan penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan badan pengawas desa, dalam hal ini juga masyarakat perlu ikut andil dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam penerapan pembangunan desa dapat berjalandengan baik. Pelaksanaan kewenangan desa memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola potensi desa yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Merbau Mataram. Apakah penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Menjelakan bahwasanya besaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2018 di Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram sebesar **Rp.868.925.552** dengan besaran dana tersebut apakah penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Merbau Mataram sudah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran dana tersebut di alokasikan untuk apa saja.

2. Tinjauan Pustaka

Transparansi (*Transparency*)

Transparency means that the provision of public service must be open, comfortable and accessible to all parties who need it and be provided adequality and efficiently understood. (Muni, 2020: 129)

Akuntabilitas (*Accounttability*)

accountability is the embodiment of the obligation to account for the succes or failur of the organization's mission implementation in achieving the goals and objective that have been estabilished through a periodic media accountability (Ulum, 2004 : 362).

Alokasi Dana Desa (*Allocation of Village Funds*)

Based on the Regulation No.113 of 2014 concerning financial management of rural village alocation fund, referred as ADD is an equalization fund recived by the district/ city in the budget pf district after decreas by the special aloocation fund.

3. Metodologi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman dan presepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi berdasarkan data yang telah diperoleh.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merbau Mataram yang ada di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang akurat dan valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara Dalam penelitian ini memegang peran yang sangat penting, karena metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menetapkan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan sendiri yang diajukan kepada informan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD.

4. Hasil dan Pembahasan

Desa Merbau Mataram adalah bagian dari kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, jarak desa dengan ibu kota kecamatan sejauh 200 m dengan waktu tempuh 5 menit. Sedangkan jarak untuk menuju ke ibukota kabupaten sejauh 70 km, dengan waktu tempuh 1 jam jika melalui jalan tol. Desa Merbau mataram yang secara administrasi berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Ketibung.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Way Karya.
4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Panjang.

Struktur pemerintahan desa merbau mataram terdiri dari

A. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas pemerintahan dan perintah provinsi dan perintah kabupaten.

B. BPD

Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

C. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun dan satu dusun terdiri beberapa RW dan RT.

Seluruh kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Penyaluran alokasi dana desa dilakukan secara bertahap pada desa Merbau Mataram yakni pada tahap I pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 173.785.110, pada tahap II diterima pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp. 347.570.22, dan pada tahap III diterima pada tanggal 16 November 2018 Rp. 347.570.221 dengan semua hasil total yang di terima bagi desa berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 868.925.552

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima desa digunakan untuk dua komponen yakni, sebesar 70% alokasi dana digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sedangkan untuk 30% alokasi dana digunakan membiayai oprasional

pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Berikut beberapa informasi mengenai transparansi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan nara sumber sekertaris desa :

"Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana yang di dapat kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kadus-kadus sehingga masyarakat dapat mengetahuinya, akan tetapi masyarakat sendiri tidak tahu atau paham dana apa yang bersumber yang penting mereka tau cuma cair dana desa"

Tabel 1
Indikator Kesesuain Transparansi Penglolaan Alokasi Dana Desa

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana desa yang digunakan untuk kegiatan	Tidak terdapatnya papan pengumuman tentang besaran dana desa yang digunakan untuk kegiatan dikatakan <i>tidak sesuai</i> dengan prmendagri
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan tidak mudah di akses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawabana realisasi pelaksanaan APBdesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan <i>tidak sesuai</i> dengan permendagri karna tidak terdapatnya papan pengumuman

		anggaran yang mudah di akses oleh masyarakat
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan add disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Sesuai dengan permendagri kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawab n realisasi pelaksanaan APBdesa kepada bupati/walikota melalui camat

Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014

Dalam hal ini perlu juga adanya peran audit independen guna untuk pemeriksaan, dimana laporan hasil pemeriksaan dari hasil tersebut wajib di laporkan atau di samapaikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)dan di publikasikan sebagai tanda pertanggungjawaban publik dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa, sesuai dengan pernyataan di atas berikut informasi yang didapat peneliti mengenai audit yang didapat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa desa Merbau Mataram :

" Untuk mengenai audit, desa merbau mataram sudah menerapkan audit guna untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa yang baik dimana arsip-arsip yang dibutuhkan seperti RPJMdesa, RKPdesa. APBdesa, Buku kas umum, Buku pajak, Buku bank dan lain-lain. Dari hasil audit tersebut pihak audit wajib melaporkan hasil audit tersebut kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). "(10:30 wib di kantor kelurahan dengan nara sumber sekretaris desa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik yang seharusnya disusun secara partisipatif. Masyarakat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran harus lah di ajak bicara darimana dan berapa besaran pendapatan desa dan di belanjakan untuk apa saja dengan demikian harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk rakyat benar-benar terwujud.

Proses pencairan dana anggran melalui beberapa tahap, yaitu pada tahapan pertama mengajukan proposal yang dimana di kordinir dahulu dengan pihak kecamatan kemudian di kumpulkan kepada dinas pemberdayaan lalu di ajukan kepada bupati. Berikut informasi yang didapat mengenai transparansi anggaran dari hasil wawancara dengan sekertaris desa Merbau Mataram :

"Pihak perangkat desa sudah menginformasikan mengenai dana anggaran kepada masyarakat melalui kadus-kadus atau rt setempat sehingga masyarakat dapat mengetahuinya, dalam hal ini perangkat desa juga mengundang BPD (badan permusyawaratan desa) untuk menerima aspirasi masyarkat guna untuk mengetahui program apa saja segingga dana anggran inidapat digunakan " (10:45 wib di kantor kepala desa dengan nara sumber sekertaris desa)

Berikut ini keterangan yang peneliti dapat dari lokasi penelitian dengan nara sumber warga setempat :

" Saat di balai setempat sedang melakukan kegiatan musyawarah bersama membahas mengenai program pembangunan desa, anggota yang hadir hanya beberapa orang saja dan yang hadir anggotanya hanya itu-itu saja seperti BPD sehingga anggota yang tidak dapat hadir seperti masyarakat kurang mengetahui informasi rapat tersebut. Akan tetapi jalan-jalan masuk di gang desa sudah di beton tidak seperti dulu yang hanya tanah merah " (12:00 wib kepada masyarakat sekitar)

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban bagi pihak yang diberikan kepercayaan/mandat oleh masyarakat/individu dimana terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang mana selanjutnya dapat diinformasikan kepada pihak internal maupun eksternal secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban dan bukan sukarela. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima bagi desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBdesa yang merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa oleh sebab itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah bersama desa. Musyawarah bersama desa merupakan kegiatan musyawarah yang di dalamnya membahas

usulan perencanaan atau program pembangunan desa. Dalam proses perencanaan pemerintah desa mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk mengusulkan program-program dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam tabe 2.

Hal tersebut di buktikan dari hasil wawancara dengan kepala desa mengungkapkan bahwa :

" Perencanaan APBdesa disusun oleh sekertaris desa berdasarkan pada RPJM desa kemudian di serahkan kepada kepala desa setelah itu dimusyawarahkan bersama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk di sepakati bersama dan yang terakhir di serahkan kepada camat untuk dievaluasi dan rancangan APBdesa tersebut menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBdesa "

Tabel 2
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Merbau Mataram 2018

No	Program
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
4	Pembangunan Tembok Penahan Tanah
5	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
8	Dukungan Penyelenggaraan PAUD
9	Penyelenggaraan Posyandu
10	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
14	Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sumber : Jaga.id, 2018

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBdesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa setiap pengeluaran belanja atas beban APBdesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Hal ini di perkuat dengan wawancara dengan nara sumber sekertaris desa bahwa :

" Semua penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening desa dan harus dilengkapi dengan bukti yang sah seperti nota atau kwintansi kemudian bukti tersebut akan di tempelkan pada buku kas umum ".

Penatausahaan

Menurut peraturan pemerinatah dalam negeri No.113 Tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan desa Merbau Mataram secara teknis telah berpedoman pada peraturan pemerintah dalam negeri No.113 Tahun 2014. Penatausahaan yang dilakukan desa Merbau Mataram melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya, berikut ini adalah anggaran pendapatan dan belanja desa untu desa Merbau Mataram

Tabel 3
Buku Kas Umum

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	20/5/18	xxx	Belanja Seragam	4.000.000		xx	xxxx	xxx
Jumlah				xxx	xx			

Sumber : Jaga.id, 2018

Tabel 4
Buku Bank

No	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			saldo
				Setoran	Bungan	pajak	penarikan	admin	
x	20/5/18	Belanja seragam		4.000.000		xx	xx	xx	xxx
Total Transaksi				xx	xx	xx	xx	xx	xx
Total Transaksi Kumulatif				xx	xx	xx	xx	xx	xx

Sumber : Jaga.id, 2018

Tabel 5
Buku Pembantu Pajak

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
x	x	xxx	xxx		xxx
x	20/5/2018	Belanja seragam (pph 22)	60.0000		xxx

Sumber : Jaga.id, 2018

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa merbau mataram sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor kepala desa yang bernama Bapak Santoso selaku kepala desa mengungkapkan bahwa:

"Untuk penatausahaan Desa Merbau Mataram sudah mengacu dan menjalankan sesuai permendagri No.113, dari pencatatan hingga sampai pelaporanya".

Tabel 6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.	Penatausahaan di Desa Merbau Mataram dilakukan oleh bendahara desa.	Dengan adanya penatausahaan yang terdapat di desa merbau mataram dan penatausahaan sudah mengacu pada permendagri bisa dikatakan desa sudah <i>sesuai</i>
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun bulan secara tertib.	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan.	Bendahara selalu melakukan pencatatan mengenai kas masuk dan keluar serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun bisa dikatakan <i>sesuai</i> karna sudah mengacu pada permendagri.
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara.	Bendahara desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan sudah <i>sesuai</i> dengan permendagri.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa.	Bendahara desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya kepada kepala desa dan sudah <i>sesuai</i> dengan permendagri.

Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014

Pelaporan

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Peraturan pemerintah dalam negeri No.113 Tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Tabel 7
LAPORAN REALISASI TAHAP I

No	Nama	Anggaran	Realisasi
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Rp.21.462.000	Rp. 21.462.000
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Rp. 7.766.000	Rp. 7.766.000
4	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Rp. 133.638.000	Rp. 133.638.000
5	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Rp. 4.050.000	Rp. 4.050.000
Total Realisasi Anggaran Tahap I		173.785.110	173.785.110

Tabel 8
LAPORAN REALISASI TAHAP II

No	Nama	Anggaran	Realisasi
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp.11.520.000	Rp.11.520.000
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp. 336.925.510	Rp. 336.925.510
Total Realisasi Anggaran Tahap II		347.570.221	347.570.221

Tabel 9

LAPORAN REALISASI TAHAP III

No	Nama	Anggaran	Realisasi
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Rp. 1.827.000	Rp. 1.827.000
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp. 155.372.500	Rp. 155.372.500
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Rp. 28.350.000	Rp. 28.350.000
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Rp. 10.675.000	Rp. 10.675.000
5	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp. 9.900.000	Rp. 9.900.000
6	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp. 3.186.200	Rp. 3.186.200
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 3.418.200	Rp. 3.418.200
9	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Penyertaan Modal BUM Desa	Rp. 86.892.555	Rp. 86.892.555
10	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Pembinaan PKK	Rp. 21.186.383	Rp. 21.186.383
11	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 550.000	Rp. 550.000
Total Realisasi Anggaran Tahap III		347.570.221	347.570.221

Tabel 10
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.	Laporan realisasi dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.	Kepala desa melaporkan laporan realisasi kepada bupati berupa <i>sesuai</i> dengan format permendagri berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Laporan realisasi semester pertama berupa APBDesa.	Laporan pertama yang digunakan berupa laporan APBDesa dan sudah <i>sesuai</i> dengan permendagri
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	Laporan Smester I dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Juli.	Pada tahapan laporan realisasi pelaksanaan APBdesa smester pertama kepala desa melaporkan laporan realisasi kepada bupati melalui camat dan sudah <i>sesuai</i> dengan permendagri.
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada akhir tahun.	Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir pada akhir taun dan sudah <i>sesuai</i> dengan permendagri.

Pertanggungjawaban

Disebutkan bahwasanya dalam peraturan pemerintahan dalam negeri No.113 Tahun 2014 pasal 38 bahwa kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

Tabel 11
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Indikator	Wawancara	Keterangan
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada	<i>Sesuai</i> dengan permendagri kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

APBdesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	bupati/walikota melalui camat
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa sudah <i>sesuai</i> dengan permendagri berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa ditetapkan dengan peraturan desa	Format laporan realisasi pertanggungjawaban sudah <i>sesuai</i> dengan peraturan desa

5. Kesimpulan

Asas pengelolaan keuangan desa menurut pemerintah dalam negeri No.113 Tahun 2014 yakni keuangan desa dikelola berdasarkan dengan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran. Selain dalam proses akuntabilitas juga berjalan dengan sendirinya aktifitas transparansi. Transparansi adalah suatu keterbukaan dalam proses perencanaan, Penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat di desa merbau mataram tidak mudah untuk mengakses tentang dana desa yang di gunakan untuk realisasi pembangunan desa serta tidak adanya papan pengumuman baik mengenai besaran anggaran dana desa dan besaran dana realisasi yang di gunakan sehingga desa merbau mataram belum transparan mengenai dana desa.

6. Daftar Pustaka

- Ardi Hamzah (2015). *Tata kelola pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris*. Surabaya: pustaka.
- Arista Widiyanti (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberjo dan Desa Kandungan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*.
- Deti Kumalasari (2016). *Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Dina, Siti (2016). *Financial Accountability in the Management of Village Fund Allocation*.

- I Putu Andi SuarJaya, Putra Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masiyah Kholmi (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedung betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*.
- Masni, Tahabu (2020). *The Effect of Transparency and Community Participation on the Management of Village fund Allocation*.
- Pemerintah Indonesia.1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Indonesia.2005. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pemerintah Indonesia.2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah Indonesia.2014. *Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan*.
- Pemerintah Indonesia (2015). *Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Pemerintah Daerah.2016. *Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa*
- Sherly Gresita Apriliani (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*.
- Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko , Taufik Kurrohman (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.
- Sri Lestari (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Banyudono*
- Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Desa*.Pustaka Baru Press:Yogyakarta